

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anggaran TGUPP Lolos Sortir

### Dialokasikan Rp19,8 M, Sempat Ditolak Dewan

JAKARTA - Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) menjadi polemik dan akan dihapus oleh Komisi A (bidang aparat) DPRD DKI Jakarta.

Namun, setelah dibahas ulang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) 2020 diketok, anggaran Rp19,8 miliar itu tetap dianggarkan oleh Bappeda.

"Di Banggar enggak dicolek-colek (dibahas-red) kok. Masih tetap sama," ungkap Mujiono, ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Menurut Mujiyono, ada kemungkinan anggaran TGUPP dibahas di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Di Banggar enggak, tapi kan masih ada pembahasan nanti," ucap Mujiyono.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mempertanyakan jumlah usulan anggaran TGUPP tersebut.

"TGUPP, mana orangnya? Ini

mengajukan anggaran ini, sesudah dipotong menjadi Rp19 miliar lebih kurangnya," tutur dia kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono.

Gembong mengatakan, tak perlu ada anggaran untuk TGUPP di Bappeda. TGUPP bisa menggunakan anggaran operasional gubernur.

"Lebih baik untuk TGUPP Rp 0, tidak perlu dianggarkan. Kalau mau menggunakan TGUPP, silakan pakai dana operasional gubernur," ujar Gembong.

Gembong menyatakan, penghilangan anggaran untuk TGUPP dilakukan guna efisiensi anggaran. Dana yang dianggarkan harus berdampak pada pembangunan Jakarta.

"Kalau diperkenankan, lebih baik sudahlah, kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," kata Gembong.

Plt Kepala Bappeda DKI Suharti mengatakan, anggaran TGUPP masih

belum dihapus. Pemrov DKI Jakarta juga akan mengunggah draf KUA-PPAS ke situs apbd.jakarta.go.id. Usulan anggaran DKI itu akan diunggah pada Selasa 3 Desember 2019.

Pada draf tersebut, urai dia, dana TGUPP masih dianggarkan dan tidak ada perubahan perihal usulan anggaran senilai Rp19,8 miliar.

Namun, kata Suharti, untuk memastikan ada tidaknya anggaran untuk TGUPP, dirinya menyerahkan segala informasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Yang saya tahu sekitar Rp19 miliar untuk yang kapan selesainya, ini dengan BPKD," imbuh dia.

Dia menambahkan, proses input draf usulan anggaran DKI masih dilakukan. Belum diunggahnya draf ke situs karena adanya sejumlah kegiatan kerja yang sebelumnya belum dibahas dalam rapat rancangan KUA-PPAS.

Suharti juga memastikan draf yang diunggah ke situs resmi APBD DKI Jakarta akan menampilkan secara rigit kegiatan kerja dan besaran anggarannya. "Untuk menyesuaikan pagu terbaru sesuai dengan kegiatan-kegiatannya," kata dia. (aen)